



Reformasi Arab Saudi Pada Era Faisal bin Abdul Aziz (1964–1975)

Daffa Agussandy Ikhsan,^{1*} Ida Putri,² Zakiya Darajat³

¹ Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

² Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

³ Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

* E-mail: daffa.ikhsan20@mhs.uinjkt.ac.id, idapucay@mhs.uinjkt.ac.id, zakiya.darajat@uinjkt.ac.id

Citation: Ikhsan, D. A., Putri, I., Darajat, Z. "Reformasi Arab Saudi Pada Era Faisal bin Abdul Aziz (1964–1975)". *Socio Historica* 2023, Vol. 2, No. 1. DOI:<https://doi.org/10.15408/sh.v2i1.29703>

Publisher's Note: Socio Historica stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study looks at the reforms that took place in Saudi Arabia after King Faisal bin Abdul Aziz inherited the throne. The purpose of this research is to describe the policies enacted by King Faisal bin Abdul Aziz of Saudi Arabia throughout his reign (1964–1975). Historical research is used, which entails source collection, source evaluation, interpretation, and writing. According to the conclusions of this study, Faisal bin Abdul Aziz officially came to the throne as King of Saudi Arabia in 1964. Faisal bin Abdul Aziz enacted a number of initiatives that resulted in substantial changes in the Kingdom of Saudi Arabia during his reign. Faisal spearheaded reform initiatives to improve Saudi society and transform the country's different features. Furthermore, King Faisal bin Abdul Aziz's policies influenced developments in a variety of sectors of the Saudi Arabian Kingdom, including education, foreign policy, and law.

Keywords: Saudi Arabia, Islam, Faisal bin Abdul Aziz, Reform, Policy.

Abstrak: Penelitian ini membahas Reformasi yang terjadi di Arab Saudi setelah Faisal bin Abdul Aziz naik tahta sebagai raja. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz selama menjabat sebagai raja Kerajaan Arab Saudi (1964–1975). Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yang dimulai dari pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faisal bin Abdul Aziz secara resmi naik tahta sebagai raja Arab Saudi pada tahun 1964. Dalam masa kekuasaannya, Faisal bin Abdul Aziz melakukan berbagai kebijakan yang berdampak pada perubahan dalam Kerajaan Arab Saudi. Faisal menjalankan usaha reformasi untuk mulai membawa masyarakat Arab Saudi ke arah kehidupan modern dan mengubah berbagai aspek yang ada di dalam negara. Lebih lanjut, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz berperan dalam memicu perubahan Kerajaan Arab Saudi di berbagai sektor termasuk pendidikan, politik luar negeri, dan hukum.

Kata Kunci: Arab Saudi, Islam, Faisal bin Abdul Aziz, Reformasi, kebijakan.

1. Pendahuluan

Masa awal kepemimpinan Faisal bin Abdul Aziz sebagai raja Arab Saudi bukanlah hal yang mudah karena ia mewarisi masalah-masalah yang muncul pada masa raja sebelumnya, Saud bin Abdul Aziz. Pada saat itu, walau kerajaan mengalami peningkatan pendapatan dari industri perminyakan, hal ini justru meningkatkan gaya hidup mewah dan korupsi di tengah lingkaran para elit pejabat kerajaan.¹ Selain peningkatan korupsi di tengah keluarga kerajaan, ada masalah-masalah lain yang harus dihadapi oleh Faisal bin Abdul Aziz saat mulai naik tahta termasuk perbudakan, pembengkakan hutang negara, dan lain-lain.

Kenaikan tahta Faisal bin Abdul Aziz adalah salah satu titik balik dalam perkembangan sejarah Arab Saudi. Ia berusaha untuk memajukan negaranya dengan perkembangan yang komprehensif. Faisal bin Abdul Aziz juga mulai melakukan moderasi dalam kebijakan-kebijakannya baik di level nasional atau internasional. Hal ini dilakukan agar kebijakan negara tidak menjadi kaku dengan ajaran agama.² Pada masa pemerintahannya lah terjadi perkembangan dan modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan di Arab Saudi termasuk pendidikan, kesehatan publik, media masa, sistem legislasi dan hukum, serta administrasi haji.

Studi ini mengulas secara deskriptif beberapa kebijakan yang dibuat oleh Faisal bin Abdul Aziz dalam misi reformasinya selama menjabat sebagai raja Arab Saudi. Fokus dari studi ini adalah kebijakan-kebijakan Faisal bin Abdul Aziz dalam bidang media masa, hukum, pendidikan, dan sikapnya terhadap konflik Palestina-Israel. Memilih bidang-bidang tersebut bukanlah tanpa alasan. Bidang-bidang yang menjadi fokus dari studi ini adalah hal-hal yang mengalami perubahan signifikan pada masa Faisal bin Abdul Aziz dan bahkan beberapa di antaranya mengalami penolakan dari tokoh-tokoh agama konservatif.

Dalam menggambarkan reformasi yang dijalankan oleh Faisal bin Abdul Aziz ini, berbagai buku dan artikel otoriter yang menceritakan sejarah Faisal bin Abdul Aziz, menjadi sumber yang diutilisasi oleh penulis. Lebih jauh, pertanyaan penelitian yang disodorkan dalam tulisan ini adalah: bagaimana gerakan reformasi yang dijalankan oleh Faisal bin Abdul Aziz berdampak terhadap kehidupan masyarakat Arab Saudi, dan sejauhmana urgensi dari reformasi tersebut?

2. Metode Penelitian

Studi ini merupakan sebuah penelitian biografis. Biografi merupakan riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain baik tokoh tersebut masih hidup atau sudah meninggal.³ Penelitian biografis menggunakan metode sejarah yang meneliti hubungan seseorang dan masyarakat. Tujuan utama penelitian biografis adalah menggali sifat dan watak dari seorang tokoh dan menjelaskan pengaruh sang tokoh terhadap masyarakat. Ide-ide Faisal bin Abdul Aziz untuk melakukan perubahan bagi

¹ Alexei Vassiliev, *The History of Saudi Arabia* (Saqi Books, 2000), 1-3.

² Bilal Ahmad Kutty, *Saudi Arabia Under King Faisal* (Aligarh Muslim University: Aligarh, 1997), 50.

³ Safari Daud, "Antara Biografi dan Historiografi (Studi 36 Buku Biografi di Indonesia)," *Analisis*, vol.13 no.1 (2013), 243-4.

negaranya menarik untuk dikaji karena hal tersebut memengaruhi arah gerak perkembangan Arab Saudi.

Periode yang dikaji dalam studi ini adalah masa kepemimpinan Faisal bin Abdul Aziz (1964–1975). Faisal telah memberikan kontribusi bagi Arab Saudi bahkan sebelum menjadi raja, sehingga kebijakan-kebijakannya pada saat menjabat sebagai perdana menteri juga akan dibahas dalam tulisan ini. Studi ini juga berusaha untuk memaparkan pro dan kontra yang muncul dalam kebijakan Faisal bin Abdul Aziz.

Pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini bersifat kepustakaan. Penelitian yang bersifat kepustakaan akan berfokus kepada sumber-sumber tertulis dalam mengumpulkan informasinya. Dalam studi ini sendiri sumber-sumber diambil dari berbagai buku, artikel jurnal, maupun sumber internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perjalanan Karir Faisal bin Abdul Aziz

Faisal bin Abdul Aziz adalah salah satu penguasa yang paling berpengaruh di Arab Saudi. Pengaruh yang diberikan Faisal menjadi titik tolak dimulainya modernisasi Arab Saudi yang akan berlanjut hingga masa raja-raja setelahnya. Faisal bin Abdul Aziz mulai berperan dalam pemerintahan sejak mengurus urusan hubungan internasional Arab Saudi pada tahun 1926 ketika ia masih berusia 21 tahun. Karir Faisal terus berlanjut selama masa kekuasaan ayahnya yang berakhir pada tahun 1953. Pada periode kekuasaan saudaranya, Saud bin Abdul Aziz, Faisal menjabat sebagai perdana menteri, menteri luar negeri, dan putra mahkota.⁴

Faisal bin Abdul Aziz lahir di Riyadh pada tahun 1905. Ibunda Faisal, Tharafah binti Abdullah⁵ adalah anak dari seorang ulama terkenal, Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif yang merupakan keturunan dari Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tharafah binti Abdullah meninggal ketika Faisal masih berusia enam bulan.⁶ Setelah kepergian sang ibu, Faisal diasuh oleh kakek dan neneknya, Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif dan Hayah binti Abdur Rahman. Di bawah pengasuhan Syaikh Abdullah, Faisal memperoleh pendidikan agama Islam dan berhasil menghafal al-Qur'an pada usia 10 tahun.

Dalam usianya yang masih belia, Faisal sangat antusias membantu ayahnya, Abdul Aziz bin Abdurrahman (Ibnu Saud) dalam mendirikan Kerajaan Arab Saudi. Ia sering berdiskusi seputar isu politik dengan ayahnya dan menunjukkan ketertarikannya kepada permasalahan nasional maupun internasional. Ia menemani ayahnya menyerang Bani Rasyid pada tahun 1918, saat masih berusia belasan tahun. Satu tahun setelahnya, Ibnu Saud diundang ke London untuk menghadiri perayaan

⁴ Bilal Ahmad Kutty, *Saudi Arabia Under King Faisal* (Aligarh Muslim University: Aligarh, 1997), 7.

⁵ Winberg Chai, ed., *Saudi Arabia: A Modern Reader* (University of Indianapolis Press: Indianapolis, 2005), 9.

⁶ Alexander Bligh, "The Saudi Religious Elite (Ulama) as Participant in the Political System of the Kingdom," *International Journal Middle East Study* 17 (1985): 37-50

kemenangan Sekutu pada Perang Dunia I⁷ dan saling menjalin persahabatan.⁸ Ibnu Saud tidak dapat memenuhi undangan tersebut dan pada awalnya hendak menunjuk anaknya, Turki bin Abdul Aziz untuk menghadiri pesta perayaan tersebut, namun Turki lebih dulu meninggal karena terkena wabah influenza (Flu Spanyol).⁹ Saat itu, Turki bin Abdul Aziz adalah kandidat terkuat untuk meneruskan kekuasaan ayahnya. Kandidat lainnya adalah Saud bin Abdul Aziz yang sama-sama tumbuh untuk menjadi pemimpin.

Namun karena Saud adalah saudara kandung dari Turki, Ibnu Saud memiliki keengganan untuk mengirimnya terlalu cepat setelah kematian Turki. Akhirnya Ibnu Saud memilih Faisal yang saat itu berusia 13 tahun untuk menghadiri undangan di London. Misi Faisal di London lebih bersifat simbolis untuk mewakili Saud bin Abdul Aziz sehingga ia tidak menjadi negosiator utama dalam pertemuan dengan pemerintah Inggris. Dalam kunjungan tersebut, Faisal didampingi oleh dua pengawal, Ahmad Thunayan dan Abdullah al-Qosaibi. Di bawah bimbingan Ahmad Thunayan lah Faisal belajar cara untuk menghadapi 'orang asing', sedangkan Abdullah al-Qosaibi bertugas untuk mendapatkan persediaan dan perlengkapan yang dibutuhkan dari Eropa. Dalam kunjungannya ke Inggris tersebut, Faisal bertemu dengan Raja George V di Istana Buckingham. Selain itu ia juga mengunjungi Universitas Cambridge dan berbagai medan pertempuran di bagian utara Prancis. Sementara para pengawalnya menyelesaikan tugas mereka, Faisal menghabiskan banyak waktunya untuk menjelajahi berbagai hal tentang Eropa.

Setelah menyelesaikan tugasnya di Eropa, Ibnu Saud memberikan tugas militer kepada Faisal. Ia diminta untuk melancarkan operasi militer di wilayah Asir.¹⁰ Setelah berhasil menguasai Asir, Faisal menemani ayahnya dalam serangkaian penaklukan wilayah Hijaz. Bersama saudaranya, Saud bin Abdul Aziz, ia memukul mundur Abdullah ar-Rasyid ke daerah ash-Shuaybah pada tahun 1920. Setelah itu pergi menaklukan Abha pada 1922. Di tahun 1933, Faisal bin Abdul Aziz membawa pasukannya menuju Tihamah yang membawanya pada kemenangan dan sekaligus berada di jalur masuk untuk menaklukan Yaman.

Pada tahun 1924, Abdul Aziz bin Abdurrahman (Ibnu Saud) berhasil menaklukan Hijaz dan memosisikan Faisal sebagai penguasa di sana dan sekaligus sebagai sekretaris dari hubungan internasional negara. Dalam perjalanannya memimpin Hijaz tentunya ia tidak akan hanya mengurus situs suci di Mekkah dan Madinah, tetapi juga akan bertemu dengan ribuan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Ibnu Saud mengirim Faisal ke Eropa Barat

⁷ Bilal Ahmad Kutty, *Saudi Arabia Under King Faisal* (Aligarh Muslim University: Aligarh, 1997), 9.

⁸ Hasan S. Abedin, *Abdul Aziz Al-Saud and the Great Game in Arabia, 1896-1946* (King's College: London, 2002), 78.

⁹ Hassan Sayyid Abedin, *Abdul Aziz Al-Saud and the Great Game in Arabia, 1896-1946* (King's College London, 2002), 56.

¹⁰ Asir adalah sebuah wilayah yang berada di Selatan Arab Saudi. Ketika itu wilayah Asir berada dalam kekuasaan Idrisi.

¹¹ Mohammad Zaid Al-Kahtani, *The Foreign Policy of King Abdulaziz (1927 – 1953)* (University of Leeds, 2004), 13.

untuk menjalin kontak dengan pemerintahan asing dan memantau situasi yang berkembang di sana. Sebelum berangkat ke sana, sebuah dewan konsultatif (Majlis al-Wukala) dibentuk di Mekkah dengan menjadikan Faisal sebagai presidennya.¹² Pada tahun Kerajaan Arab Saudi didirikan, 1932, Faisal memimpin delegasi pemerintah dalam kunjungan ke Moskow dan disambut oleh Joseph Stalin. Hubungan antara Arab Saudi dan Uni Soviet saat itu terjalin dengan baik dan Faisal tertarik mengunjungi Uni Soviet karena populasi Muslim yang besar di sana.¹³ Kelak Uni Soviet akan mengakui kedaulatan Kerajaan Arab Saudi.

Peristiwa lain yang juga terjadi pada tahun 1932 adalah pernikahan Faisal dengan Iffat binti Muhammad Thunaiyan. Iffat adalah anak perempuan dari Abdullah bin Thunayan, amir wilayah Najd pada pertengahan abad ke-19. Ia lahir di Istanbul dan menikah dengan Faisal bin Abdul Aziz pada 1932. Iffat kelak akan menjadi sosok yang memberikan kontribusi dalam memajukan pendidikan di Kerajaan Arab Saudi.¹⁴

Iffat binti Muhammad Thunaiyan adalah orang yang memperjuangkan pendidikan bagi perempuan Arab Saudi. Ia meyakini bahwa perempuan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan ia berhasil mewujudkannya. Ia mendirikan *Dar al-Hanan*¹⁵ sekolah perempuan pertama di Arab Saudi pada tahun 1956. Faisal dan Iffat menamai sekolah tersebut dengan nama '*Dar al-Hanan*' karena terinspirasi dari ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk merawat anak-anak¹⁶. Proses untuk mendirikan sekolah *Dar al-Hanan* bukanlah tanpa hambatan. Iffat harus menghadapi berbagai penolakan dari kalangan konservatif Arab Saudi. Namun Faisal dan Iffat tetap berkomitmen untuk mendirikan sekolah ini sebagai usaha memajukan pendidikan perempuan Arab Saudi.¹⁷

Pasca Perang Dunia II, Faisal mulai membentuk hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Faisal menghadiri pendirian PBB di San Fransisco dan juga menjadi perwakilan Arab Saudi di Liga Arab dan Majelis Umum PBB. Selama kunjungannya ke Amerika Serikat, Faisal bertemu dengan Presiden Roosevelt. Kunjungan Faisal ke Amerika Serikat memiliki dua tujuan yaitu membangun hubungan diplomatik dan kerjasama pembangunan untuk Arab Saudi, oleh karena itu ia mengunjungi tempat-tempat proyek agrikultur, kilang minyak, projek irigasi, bendungan, dan universitas. Semua itu dilakukan untuk membentuk perencanaan pembangunan Arab Saudi ke depannya.¹⁸ Arab Saudi mulai menjadi faktor penting dalam pergaulan politik internasional selama tahun 1950-an.

¹² Bilal Ahmad Kutty, *Saudi Arabia Under King Faisal* (Aligarh Muslim University: Aligarh, 1997), 88.

¹³ Bilal Ahmad Kutty, *Saudi Arabia Under King Faisal* (Aligarh Muslim University: Aligarh, 1997), 90.

¹⁴ Ghazy Mujahid, "Education for Girls in Saudi Arabia," *Muslim Education Quarterly* 4, no. 3 (1987): 59-60.

¹⁵ Robert Lacey, *The Kingdom* (Harcourt Brace Jovanovich, 1982), 13.

¹⁶ Rujuk QS. Maryam ayat 13.

¹⁷ Ghazy Mujahid, "Education for Girls in Saudi Arabia," *Muslim Education Quarterly* 4, no. 3 (1987): 59-60.

¹⁸ Bilal Ahmad Kutty, *Saudi Arabia Under King Faisal* (Aligarh Muslim University: Aligarh, 1997), 91.

Akan tetapi, pada 1953, Abdul Aziz bin Abdurrahman (Ibnu Saud) wafat dan digantikan oleh anak tertuanya, Saud. Pada masa itu, pemasukan Arab Saudi memang meningkat sebagai hasil penjualan minyak, namun hal tersebut juga membawa berbagai masalah bagi kerajaan. Masa pemerintahan Saud bin Abdul Aziz dikenal dengan pemborosan uang negara untuk kepentingan pribadi. Saud banyak menghabiskan uang negara untuk membangun istana-istana mewah pada saat Arab Saudi sedang berjuang membangkitkan ekonominya. Hasil penjualan minyak yang tinggi tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada. Hutang Arab Saudi yang semula berjumlah 200 juta dollar di tahun 1953 meningkat pada tahun 1958 menjadi 450 juta dollar. Selain itu, Saud juga kerap memberikan anak-anaknya berbagai posisi penting di kerajaan. Hal ini menarik perhatian dari anggota keluarga kerajaan yang lain karena menilai anak-anak Saud tidak memiliki kapabilitas yang cukup untuk menempati posisi-posisi penting tersebut.¹⁹ Di antara anggota keluarganya yang diberikan berbagai posisi penting tersebut adalah Fahd bin Saud sebagai Menteri Pertahanan; Khalid bin Saud sebagai komandan Garda Nasional; Musaid bin Saud sebagai pemimpin Pengawal Kerajaan; dan Saad bin Saud di Pasukan Khusus. Selain itu ia juga memberikan posisi strategis lainnya seperti posisi gubernur Provinsi Riyadh dan gubernur Provinsi Makkah.

Pemborosan yang dilakukan oleh Saud hampir membuat keuangan negara kosong. Oleh karena itu pada tahun 1958 Faisal mendirikan Badan Keuangan Arab Saudi guna menyelamatkan negara dari masalah finansial. Program yang dijalankan Faisal tidaklah berjalan tanpa hambatan, masalah justru datang dari internal keluarga kerajaan. Terjadi sebuah rivalitas antara Saud sebagai raja dan Faisal sebagai perdana menteri. Pada 5 Maret 1962, Raja Saud memutuskan untuk merombak kabinet dan menjadikan dirinya sebagai raja sekaligus perdana menteri. Posisi Faisal dalam mengelola negara dikurangi sehingga ia memilih pergi ke Amerika Serikat dan meninggalkan kerajaan. Kepergian Faisal ke Amerika Serikat ini pada awalnya adalah untuk pemeriksaan kesehatan namun akhirnya kepergian ini ia lakukan sebagai bentuk ketidaksetujuan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh saudaranya, Saud. Selama kepergiannya tersebut, Faisal berusaha untuk menggalang dukungan dari Amerika Serikat melalui pertemuannya dengan presiden John F. Kennedy.

Melihat kondisi negara yang terus mengalami kemunduran, Faisal terus diminta untuk kembali ke Arab Saudi hingga akhirnya pada 17 Oktober 1962 ia pulang dari Amerika Serikat dan ditunjuk menjadi Perdana Menteri. Faisal segera membentuk kabinet baru pada 31 Oktober 1962. Pada 6 November 1962, Faisal mengeluarkan 10 poin dari program reformasinya yang termasuk di dalamnya perbaikan administrasi, ekonomi, sistem hukum dan pendidikan. Langkah pertama Faisal dalam menjalankan reformasinya ini adalah dengan menstabilkan kondisi keuangan negara.

¹⁹ King Saud bin Abdul Aziz, <https://houseofsaud.com/profiles/king-saud-bin-abdulaziz-al-saud/>. Diakses pada 5 Desember 2022

Ia memotong anggaran pemborosan anggota keluarga kerajaan, melakukan penghematan, dan menganggarkan kekayaan kerajaan untuk membayar hutang-hutang. Langkah-langkah yang diambilnya ini mulai mengembalikan stabilitas kerajaan dan mendorong masuknya dana investasi asing untuk pengembangan berbagai proyek di Arab Saudi.

Program-program yang dijalankan oleh Faisal kembali mendapat hambatan dari Raja Saud. Pada 1963, Saud seringkali pergi dari kerajaan untuk alasan berobat. Situasi ini dimanfaatkan oleh Faisal untuk menggalang kekuatan politik untuk dirinya. Faisal mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota senior keluarga kerajaan kecuali Saud. Hasil dari pertemuan itu sepakat untuk mendukung Faisal dan menurunkan Saud dari tahta kerajaan. Saud mengerahkan Garda Keamanan Kerajaan untuk mengepung Istana Nasriyah, dan secara bersamaan Faisal mengerahkan Garda Keamanan Nasional untuk mengepung istana Saud. Akhirnya pada 2 November 1964 Saud diturunkan dari tahta kerajaan dan Faisal resmi menjadi raja ketiga Kerajaan Arab Saudi. Saud kemudian diusir dari kerajaan dan tinggal di Mesir sebelum kemudian pindah untuk tinggal di Yunani.²⁰

3.2. Perkembangan Media Massa di Arab Saudi pada Masa Faisal bin Abdul Aziz

Salah satu cita-cita Faisal bin Abdul Aziz adalah melakukan modernisasi masyarakat Arab Saudi dalam berbagai aspek. Bagi Faisal, perubahan dalam sistem informasi di Arab Saudi seperti pers, radio, dan televisi sejatinya dapat mengubah masyarakat pula. Masa jabatan Faisal sejak menjadi perdana menteri di tahun 1962 hingga kematiannya sebagai raja pada tahun 1975 telah memberikan banyak kemajuan bagi media massa Arab Saudi. Ketika Faisal menjadi perdana menteri di tahun 1962, ia mendapati sistem informasi di Arab Saudi sangat terbelakang dan tidak berkembang. Koran-koran tidak dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di negara. Walau koran sudah ada di Hijaz sejak 1908, namun hingga tahun 1924 kebanyakan dari tulisan-tulisannya dibuat dan diedit oleh orang-orang dari luar Hijaz seperti Turki dan Suriah.

Surat kabar Jeddah *Barid al-Hijaz* mulai diterbitkan pada 1924 sebagai media massa pertama yang kontennya ditulis oleh orang Arab asli, namun surat kabar ini hanya bertahan selama setahun. Surat kabar Mekkah, *Ummul Qura* yang didirikan oleh pemerintah Saudi di Desember 1924 awalnya diedit oleh orang Suriah namun kemudian diurus oleh orang-orang Arab.

Saat Faisal menjadi perdana menteri pada 1962, jurnalisme dan siaran radio di Arab Saudi benar-benar dalam keadaan terbelakang. Sebelumnya, Raja Abdul Aziz pernah mendirikan jaringan radio pribadi yang menghubungkan berbagai wilayah di Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932. Namun jaringan radio ini tidak terbuka untuk publik. Di tahun 1948, pemerintah menyediakan sebuah stasiun radio gelombang pendek di Jeddah untuk menyiarkan program-program Islami bagi masyarakat Arab

²⁰ Joseph A. Kechichian, *Succession in Saudi Arabia* (Palgrave Macmillan, 2001), 6.

Saudi. Stasiun radio ini dinamakan *Radio Mecca* dan tidak banyak berkembang karena salurannya tidak dapat dijangkau oleh wilayah di luar Hijaz.

Ada beberapa sebab yang membuat kondisi keterbelakangan di bidang media massa ini terus berlanjut sampai masa Faisal menjadi perdana menteri di tahun 1962. Sebab *pertama* adalah adanya perselisihan antara kaum iliterat bahkan beberapa juga berasal dari kalangan agamis dengan pemerintah dalam masalah media massa. Mereka berpendapat bahwa media massa dapat menyebabkan kerusakan moral bagi masyarakat Arab Saudi sehingga mereka menolak keberadaannya. *Kedua*, persebaran populasi yang tersebar di wilayah yang terlalu luas sehingga menyebabkan kesulitan distribusi surat kabar. *Ketiga*, rendahnya tingkat literasi masyarakat Arab Saudi yang menjadi hambatan utama dalam pengembangan media massa.²¹

Selama masa kepemimpinan Faisal, media informasi mengalami perkembangan yang drastis. Di tahun 1975, sudah ada tujuh surat kabar harian berbahasa Arab dibandingkan dengan sebelum Faisal memimpin hanya ada tiga surat kabar yang beredar dan hanya dicetak di Jeddah. Pada periode ini perluasan surat kabar lebih cepat dari perkembangan tingkat literasi. Sebelum masa kepemimpinan Faisal siaran radio domestik hanya dapat didengar di wilayah Hijaz dan hanya ada sekitar 500 ribu pendengar aktif di seluruh wilayah Kerajaan. Pada akhir masa kepemimpinan Faisal di tahun 1975, siaran radio domestik di berbagai kota Arab Saudi telah hampir menjangkau seluruh wilayah Kerajaan dan jumlah pendengar meningkat hingga 2,5 juta pendengar. Saluran televisi tidak ada pada tahun 1962. Transmitter televisi baru dipasang pada 1975 di Jeddah, Thaif, Madinah, Buraidah, Riyadh, dan Dammam serta sudah memiliki 1,5 juta penonton dari masyarakat Arab Saudi.²²

Pada Januari 1964, untuk pertama kalinya Faisal bin Abdul Aziz menandatangani kesepakatan dengan *National Broadcasting Company* (NBC) di New York untuk membangun sebuah jaringan nasional. Uji coba transmisi pertama dimulai pada 17 Juli 1965 di Jeddah dan Riyadh. Tujuan dari pembangunan jaringan televisi dan radio yang dilakukan oleh Faisal adalah untuk membantu orang-orang yang hidup di wilayah terisolasi agar dapat meningkatkan kesatuan masyarakat Arab Saudi dengan saling mengenali satu sama lain. Faisal berusaha untuk mengembangkan media secara seimbang dengan membangun fasilitas radio dan televisi yang sama antara Hijaz (wilayah Barat) dan Najd (wilayah Pusat). Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka semua mendapat perlakuan yang sama tanpa melebihkan wilayah yang satu atas yang lain.

Di tengah laju perkembangan media massa yang dilakukan oleh Faisal, datang penolakan dari kalangan ulama dan kelompok konservatif di Arab Saudi yang tidak setuju dengan pemasangan jaringan radio maupun televisi. Penolakan yang serupa juga pernah diterima oleh ayah Faisal, Abdul Aziz (Ibnu Saud) yang dimusuhi ulama ketika hendak memasang unit-unit telepon di Riyadh, Madinah, dan tempat-tempat

²¹ Bilal Ahmad Kutty, *Saudi Arabia Under King Faisal* (Aligarh Muslim University: Aligarh, 1997), 91.

²² Kutty, 92.

lain. Dalam pandangan mereka, benda-benda seperti itu (radio dan televisi) akan membawa kepada kerusakan moral dan perbuatan dosa. Hal-hal tersebut tidak menggoyahkan Faisal dari tujuannya untuk mengembangkan fasilitas penyiaran modern, namun ia juga tidak mengabaikan sikap kalangan ulama tersebut. Faisal mula-mula menampilkan program-program keagamaan yang disampaikan dari ulama-ulama terkenal agar menunjukkan bahwa televisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Dengan cara tersebut, kehadiran jaringan televisi dapat menjadi lebih diterima oleh masyarakat.

Alasan Faisal mengembangkan fasilitas siaran televisi juga karena pertimbangan kebijakan luar negeri Arab Saudi dan ditambah fakta bahwa pada tahun 1960-an beberapa warga yang tinggal di perbatasan dapat melihat program televisi asing seperti dari Kuwait dan Iran, namun tidak bisa mendapat program televisi dari Arab Saudi sendiri. Faisal juga berusaha mengembangkan bidang jurnalisme untuk masyarakat Arab Saudi agar bisa bergerak secara mandiri. Kementerian Informasi dibentuk pada 1962 untuk meningkatkan jurnalisme Arab Saudi. Pada Januari 1964, Raja Faisal mengesahkan undang-undang pers baru dengan mengeluarkan dekrit kerajaan yang membuat pemerintah memiliki otoritas lebih untuk melakukan intervensi ketika dibutuhkan. Tujuan dari hal ini adalah untuk menguatkan pers dengan meluaskan kepemilikan dan menetapkan standar minimum. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap penerbit harus memiliki dewan direksi yang terdiri dari 15 orang Saudi, dan setiap koran harian harus memiliki setidaknya lima orang editor tetap, dua orang penerjemah bahasa asing, seorang fotografer dan koresponden yang tinggal di tiga ibukota negara lain.

Media di Arab Saudi berperan sebagai penyebaran nilai-nilai keagamaan dan promotor perubahan sosial secara bersamaan. Dengan adanya dua peran yang dimainkan oleh media Arab Saudi membuat media memberikan implikasi yang besar untuk pengembangan masyarakat. Media pada masa Faisal dijadikan sebagai sebuah usaha untuk menyatukan jiwa dan sisi psikologis dari semua masyarakat Arab Saudi. Maksudnya adalah walaupun Raja Abdul Aziz telah berhasil menyatukan secara politik semua masyarakat yang ada di Arab Saudi, namun sepanjang tahun 1950-1960-an orang-orang masih membanggakan kesukuan mereka daripada mengakui kesatuan sebagai Kerajaan Arab Saudi. Sebagai contoh adalah ketika seseorang lahir di Jeddah (daerah Hijaz) walaupun ia bekerja sebagai petugas pemerintahan di Riyadh, ia akan lebih memilih untuk mengakui dirinya sebagai *Jeddawi* (warga Jeddah) atau *Hijazi* (warga Hijaz) daripada sebagai *Saudi* (warga Arab Saudi). Hal ini yang ingin diperbaiki oleh Faisal dengan membangun jaringan media yang lebih luas di Kerajaan Arab Saudi.

Media massa sejatinya telah membawa perubahan sosial di tengah masyarakat Arab Saudi. Perubahan terbesar mungkin datang dari televisi karena menjadi seperti 'jendela Dunia' bagi masyarakat Arab Saudi. Setelah televisi diperkenalkan, banyak masyarakat Saudi yang dapat melihat gambar dan mendengar suara baik dari dalam maupun luar negeri. Hal yang sama juga dialami pendengar radio Saudi yang

berkesempatan untuk memperoleh akses akan ide-ide dan informasi baru dari stasiun penyiaran nasional dan internasional.

Satu hal yang harus diperhatikan mengenai perkembangan media masa di Arab Saudi adalah intensitas dari intervensi pemerintah terhadap media. Pemerintahan di masa Faisal memiliki campur tangan dalam perkembangan media. Penyiaran saluran radio dan televisi diatur dan dimonopoli oleh pemerintah secara langsung. Namun hal yang berbeda terjadi dalam perkembangan pers. Pemerintah Arab Saudi tidak memiliki kendali langsung atas pers karena dimiliki oleh swasta dan Faisal tidak berniat untuk mengambil kendali secara paksa atas media tersebut. Sebagai gantinya, ia ingin pers mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan loyal terhadap apa yang ia anggap sebagai cita-cita Arab Saudi. Berbeda dengan kebanyakan pemerintahan revolusioner di Timur Tengah yang biasanya menjadikan media surat kabar mereka sebagai alat untuk mempromosikan tujuan-tujuan politik rezim secara agresif, Faisal lebih nyaman dengan pers yang pasif secara politik.²³

3.3. Pengembangan Sistem Legislatif dan Hukum oleh Faisal bin Abdul Aziz

Ketika pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Madinah menuju Damaskus pada masa Dinasti Umayyah, banyak wilayah yang tidak terjangkau hukum dan kontrol dari Dinasti Umayyah sehingga menyebabkan kekuatan politik lain berhasil merebutnya. Ketika wilayah kekuasaan menjadi terlalu luas orang-orang yang berlokasi jauh dari pusat pemerintahan menjadi seperti terlepas dari hukum negara dan kembali menerapkan kesukuan dan kebiasaan pagan mereka dahulu.²⁴

Sebelum berdirinya Kerajaan Arab Saudi, Jazirah Arab berada dalam kondisi yang terpecah belah tanpa satu kekuatan pusat. Wilayah Najd Utara dikuasai oleh suku Tay, wilayah Al-Hasa dikuasai oleh Banu Khalid, 'Uyainah dipimpin oleh Al-Muammar, Dir'iyah dikuasai oleh suku 'Anza, dan lain-lain. Upaya untuk menyatukan kembali Jazirah Arab dimulai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud pada pertengahan abad ke-18. Usaha penyatuan Jazirah Arab mulai nampak berhasil dengan pendirian Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932 yang dipimpin oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Alu Saud (Ibnu Saud).

Kerajaan Arab Saudi menjadi bukti akan kemampuan Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab dalam mendirikan sebuah negara modern yang menyatukan Jazirah Arab. Setelah berhasil berdiri, hal penting yang harus segera dimiliki oleh kerajaan ini adalah pengembangan legislasi modern dan Menyusun kembali sistem institusi yudisial negara tanpa mengubah jiwa keislaman yang sudah ada.²⁵

Kesulitan yang harus dihadapi oleh Abdul Aziz adalah ia harus berhadapan dengan tiga sistem hukum berbeda yang ada di Jazirah Arab saat itu. *Pertama* adalah sistem di wilayah Hijaz yang berorientasi pada kekuasaan Utsmaniyah. *Kedua* adalah sistem

²³ Willard A. Beling, *King Faisal and The Modernisation of Saudi Arabia* (Croom Helm, 1980), 102.

²⁴ Bilal Ahmad Kutty, *Saudi Arabia Under King Faisal* (Aligarh Muslim University: Aligarh, 1997), 97.

²⁵ Leslie McLoughlin, *Ibn Saud: Founder of a kingdom* (St. Martin's Press: New York, 1993), 64.

yang ada di daerah Najd. Dalam sistem ini terdapat seorang *amir* yang dibantu oleh para *qadhi* untuk mengatur sistem hukum di Najd. *Ketiga* adalah sistem hukum kesukuan yang sudah ada.

Untuk menyatukan sistem yudisial di Arab Saudi, Abdul Aziz dengan nasihat dari Faisal mengeluarkan dekrit kerajaan pada 1927 yang membagi sistem pengadilan menjadi tiga kategori hierarki: pengadilan cepat (*expeditious court*), pengadilan syariah, dan komisi pengawasan yudisial. Pengadilan cepat mengurus kasus kriminal sederhana dan sipil. Pengadilan ini dibagi menjadi pengadilan tingkat satu dan dua. Kasus-kasus yang lain akan ditangani dalam pengadilan syariah. Komisi pengawasan dibentuk untuk melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap jalannya pengadilan. Sistem ini adalah klasifikasi awal dari institusi yudisial di daerah Hijaz. Faisal bin Abdul Aziz kemudian ikut memberikan perubahan dalam perkembangan sistem legislatif dan yudikatif di Arab Saudi selama hampir 20 tahun sejak ia menjadi pangeran mahkota pada 1953 hingga kematiannya di tahun 1975. Ketika Faisal mendapat kekuasaan dengan menjadi perdana menteri, tindakan pertamanya adalah mengumumkan sepuluh poin dasar dari program reformasinya yang mencakup berbagai bidang.²⁶

Salah satu undang-undang yang dirumuskan pertama-tama oleh Faisal adalah dalam bidang aktivitas bisnis, modal, dan tenaga ahli asing bagi kerajaan. Pada 24 Februari 1964, Raja Faisal menandatangani dekrit kerajaan nomor 35 yang mengatur tentang investasi dari modal asing. Undang-undang ini yang selanjutnya menjadi basis untuk mengundang datangnya modal dan tenaga ahli asing ke Arab Saudi. Sepuluh tahun kemudian, Raja Faisal melakukan langkah berikutnya untuk mengundang tenaga-tenaga ahli bekerja di Arab Saudi. Ia menghapuskan keharusan membayar pajak pendapatan pribadi dari pekerja asing yang tinggal di Arab Saudi.

Undang-undang buruh mulai dirumuskan di Arab Saudi pada awal tahun 1947, ketika perusahaan Arabian-American Oil Company (ARAMCO) bersiap untuk melakukan produksi minyak dalam skala besar. Di tahun 1969, Raja Faisal menandatangani dekrit kerajaan mengenai regulasi buruh dan pekerja yang berlaku untuk warga Saudi dan asing. Dekrit ini mengharuskan perusahaan menetapkan peraturan kerja dan kemudian mempublikasikannya sehingga dapat diketahui oleh para pekerja. Hal ini juga dimaksudkan agar inspektur buruh dapat memastikan perusahaan melakukan kewajibannya dan memenuhi hak-hak pekerja. Peraturan ini juga mendorong penurunan angka pengangguran di Arab Saudi dengan mengutamakan pekerja dari warga Saudi dan melakukan pembatasan pekerja asing. Selain itu peraturan ini juga melarang perusahaan memecat pekerjanya tanpa alasan yang valid, menuntut pembayaran pesangon pekerja, menetapkan jam kerja, liburan, dan kebutuhan waktu untuk istirahat, serta melarang pekerja di bawah umur.

²⁶ Gerald de Gaury, *Faisal: King of Saudi Arabia* (Fons Vitae, 2008), 46.

Pada November 1969, Faisal mengeluarkan Dekrit Kerajaan M/22 yang bertujuan untuk melindungi hal lain yang berhak dimiliki oleh para pekerja Saudi, regulasi asuransi sosial. Hal ini bertujuan untuk membantu para pekerja ketika terjadi kecelakaan di tempat kerja, terkena penyakit akibat pekerjaan, dan kejadian yang menyebabkan cacat permanen atau kematian. Sebelumnya, pada 18 Agustus 1962, pemerintah juga pernah mengeluarkan peraturan jaminan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Regulasi ini membuat negara bertanggungjawab penuh untuk mendukung orang-orang dari kalangan lansia, disabilitas, dan yatim piatu.

Faisal juga melakukan perubahan di bidang yudikasi. Ia mengeluarkan dekrit untuk membentuk kementerian kehakiman dan dewan yudisial tinggi. Dekrit tersebut juga menyatakan bahwa orang yang menjabat menteri kehakiman tidaklah harus keturunan dari seorang *Syaikh*. Posisi menteri kehakiman ini juga menggantikan posisi Mufti Agung kerajaan. Dengan tindakannya ini, Faisal meninggalkan sistem hukum tradisional yang ada sebelumnya yang memberikan dan membatasi otoritas yudisial kepada tokoh pemuka agama.

Dalam masalah opini hukum dan fatwa, pada tahun 1962, Faisal mendirikan sebuah dewan yang beranggotakan 22 ulama senior untuk mengeluarkan fatwa dan opini hukum resmi untuk berbagai permasalahan tertentu yang muncul dan ditanyakan kepada mereka. Dewan ini diharapkan dapat memberikan pendapat-pendapat yang bersifat konstruktif, sesuai syariah, dan dapat berjalan dalam rangka modernism demi memenuhi kesejahteraan publik. Selain itu, pada tahun 1971, Faisal juga mendirikan *Majlis Hai'ah Kibar al-Ulama* yang beranggotakan 17 ulama dan diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Organisasi ini bertujuan untuk melakukan berbagai penelitian di bidang syariah dan juga mengeluarkan fatwa.

3.4. Pengembangan Pendidikan oleh Faisal bin Abdul Aziz

Departemen Pendidikan di Arab Saudi didirikan pada tahun 1954. Akan tetapi pada masa itu pendidikan hanya diperuntukan untuk laki-laki saja²⁷. Pada masa Raja Faisal, pendidikan sudah lebih terbuka dan merata bukan hanya kalangan bangsawan saja, melainkan seluruh rakyat Arab Saudi dapat menikmati pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan. Perhatiannya dalam pengembangan dunia pendidikan Arab Saudi sudah ia lakukan semasa ia masih menjadi Pangeran Arab Saudi. Ia dan istrinya, Iffat, turut aktif melakukan pengembangan pendidikan. Ia dan istrinya memperkenalkan pendidikan bagi kaum perempuan secara terbuka yang dapat diikuti siapa saja di tahun 1960-an. Pada titik ini perempuan dapat memperoleh pendidikan dan mendapatkan hak yang sama atau setara dengan laki-laki. Walaupun sebelumnya di tahun 1950-an Raja Saud sendiri telah membuka sekolah khusus perempuan di lingkungan istana, akan tetapi sekolah ini hanya diikuti oleh perempuan-perempuan kerajaan saja²⁸ dan pendidikan didominasi oleh laki-laki.

²⁷ Majed Alamri, "Higher Education in Saudi Arabia," *Journal of Higher Education Theory and Practice* 11, no. 4 (2011): 88–91.

²⁸ Y Machmudi, R Hidayat, and E Agustina, "Sejarah Timur Tengah Kontemporer: Kepemimpinan Di Arab Saudi Dan Libya" (2016).

Atas kampanye Pangeran Faisal dan sang istri memunculkan perdebatan. Pada masa itu pendidikan bagi perempuan dianggap tabu dan menimbulkan kekhawatiran bagi orangtua untuk mengirimkan anak perempuannya ke sekolah. Pangeran Faisal dan istrinya pun tidak berhenti meyakinkan masyarakat (Suku Badui) mengenai pentingnya pendidikan formal bagi kaum perempuan²⁹. Sehingga atas kampanye tersebut, didirikan sekolah-sekolah tingkat dasar bagi perempuan di Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1960-an dan di tahun 1960 juga Pangeran Faisal mendirikan Lembaga An-Nur, sebuah lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk penyandang tunanetra.

Perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan, makin terlihat ketika ia menjabat sebagai raja Arab Saudi. Pada tahun 1965, melalui Kementerian Pendidikan, Raja Faisal mencanangkan penghapusan buta aksara. Sebelumnya di Arab Saudi penduduk masih mengalami buta huruf. Untuk memberantas buta aksara ini pemerintah melakukan pengajaran baca tulis kepada penduduk-penduduk di setiap provinsi. Pada masa kepemimpinannya, pemerintah Arab Saudi tidak tanggung-tanggung dalam menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk pendidikan. Sebelumnya Arab Saudi hanya memiliki beberapa sekolah saja. Pada masa kepemimpinan Faisal, ia telah banyak membangun sekolah-sekolah baik untuk perempuan atau untuk laki-laki, dan juga perpustakaan, laboratorium, lapangan, dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah juga mendirikan sekolah-sekolah khusus bagi penyandang disabilitas. Sirojudin, Waslah mengemukakan bahwasanya "...orang tua siswa yang kurang mampu membiayai sekolah anaknya dibantu oleh Negara pemerintah Saudi Arabia..."³⁰ Slogan "*free education for all*" merupakan kebijakan yang dicanangkan oleh Raja Faisal.³¹

Pengkategorian tingkatan pendidikan baru terealisasi pada masa pemerintahan Raja Faisal. Menurut data statistik pembangunan tempat sarana dan pra-sarana untuk pembelajaran di tahun 1965, jumlah sekolah dasar ada 114 unit dan meningkat pada tahun 1975 dengan jumlah mencapai 338 unit. Untuk sekolah menengah pertama di tahun 1965 terdapat 10 unit dan meningkat di tahun 1975 sebanyak 212 unit. Kemudian di tingkat sekolah menengah atas di tahun 1965 sebanyak 74 sekolah, dan di tahun 1975 mencapai sebanyak 718 sekolah. Dan kemudian pada masa kepemimpinannya raja Faisal telah banyak membangun Universitas atau sekolah tinggi. Seperti Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, Universitas King Faisal di Dammam, dan sekolah tinggi lainnya. Pada masa Raja Faisal juga telah dibuka pendidikan kejuruan di antaranya ada 3 jurusan seperti jurusan perdagangan, pertanian dan industri. Pada masa Raja Faisal juga Universitas King Saud yang telah

²⁹ Amani Hamdan, "Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements," *International Education Journal* 6, no. 1 (2005): 42-64.

³⁰ Didin Sirojudin and Waslah, "SIGNIFIKANSI PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN ARAB SAUDI," *Dinamika* 5 (June 2020), 77.

³¹ Muhammad Hendra Yunal, "Pendidikan Arab Saudi: Tantangan Dan Reformasi," *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 18, no. 1 (2022): 37-44.

didirikan pada masa kepemimpinan Raja Saud mengalami perkembangan dengan penambahan fakultas baru seperti Fakultas Perminyakan dan Mineral yang diresmikan langsung oleh Raja Faisal, dan Fakultas Teknik. Di tahun 1969 M, Raja Faisal mendirikan institut Al Amal yaitu lembaga pendidikan yang dikhususkan bagi para penyandang tuli dan bisu. Disusul di tahun 1972 kementerian pendidikan mendirikan institut atau lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk para perempuan yang menyandang keterbelakangan mental.³²

Dalam reformasi pendidikan yang dilakukan oleh Raja Faisal, ia mencoba menyatukan antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu modern (sains, teknologi dan lain sebagainya) oleh sebab itu Raja Faisal dikenal sebagai seorang yang memodernisasi lembaga pendidikan di Arab Saudi. Yunal mengemukakan bahwasannya "Penguasaan terhadap sains-teknologi ini membuat Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan mengirim pelajar-mahasiswa mereka kuliah ke luar negeri."³³ Pada masa kepemimpinannya banyak tenaga pengajar yang berasal dari luar negeri (Mesir) yang didatangkan ke Arab Saudi. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, telah dibukanya jurusan-jurusan baru. Hal ini dilakukan guna perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan di Arab Saudi semakin beragam dan dapat menjadikan negara Arab Saudi menjadi negara yang mandiri. Adanya kebijakan "*free education for all*" selain memberikan beasiswa bagi penduduk Arab Saudi yang menempuh pendidikan dalam negeri, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pemerintah juga turut aktif memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri. Program beasiswa ke luar negeri ini juga dapat diikuti baik laki-laki atau perempuan. Sebelumnya pengiriman perempuan untuk menempuh pendidikan ke luar negeri belum diperkenankan. Namun, pada masa kepemimpinan Raja Faisal pelajar perempuan diperbolehkan menimba ilmu di luar negeri dan mendapatkan beasiswa.

Beasiswa tidak hanya diberikan khusus untuk penduduk Arab Saudi saja, melainkan warga di luar negara Arab Saudi. Pemerintah memberikan beasiswa pendidikan kepada para pengungsi Palestina dan juga kepada pelajar Aljazair yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Arab Saudi. Biaya pendidikan semuanya ditanggung oleh pemerintahan Arab Saudi termasuk asrama dan kebutuhan pokok lainnya.³⁴ Pelajar-pelajar non-Arab Saudi ini mendapat perlakuan yang sama seperti halnya para pelajar Arab Saudi. Pemerintahan juga akan memberikan kesempatan bagi pelajar-pelajar non Arab Saudi ini mengenyam pendidikan ke luar negeri.

Di tahun 1964 terjadi peningkatan jumlah pelajar perempuan yang mencapai 40.000 lebih pelajar perempuan. Hal ini merupakan dampak yang dilakukan Raja Faisal dan istrinya atas kampanye pada masa kepangeranannya yang terus ia kembangkan

³² Bilal Ahmad Kutty, "Saudi Arabia Under King Faisal" (Aligarh Muslim University, 1997), 96.

³³ Muhammad Hendra Yunal, "Pendidikan Arab Saudi: Tantangan Dan Reformasi," *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 18, no. 1 (2022): 37–44.

³⁴ Amin Said, *King Faisal : Raja Saudi Pelayan Umat, Penentang Imperialisme, Pertama*. (Jakarta Timur: PUSTAKA aL-KAUTSAR, 2014).

sampai ia menduduki tahta kerajaan. Bahkan anggaran pendidikan untuk perempuan ini mencapai jumlah 12 juta riyal. Di tahun 1965 tercatat ada sekitar 160 sekolah perempuan di tingkat dasar. Untuk tingkat menengah pertama di tahun 1963 hanya terdapat 1 sekolah kemudian meningkat di tahun 1973 mencapai 13 sekolah. Begitu pula dengan tingkat menengah atas di tahun 1963 hanya 5 sekolah namun angka berubah dan meningkat pesat di tahun 1973 dengan jumlah mencapai 85 sekolah. Di tahun 1969 didirikan sekolah tinggi perempuan pertama di Arab Saudi yang berletak di Riyadh.³⁵ Pada masa pemerintahannya juga secara terbuka untuk para pelajar perempuan diperkenankan untuk menempuh pendidikan ke luar negeri. Tercatat di tahun 1970an sudah ada 4 orang pelajar perempuan mendapat gelar Ph.D.³⁶

Tidak hanya mendatangkan tenaga pengajar dari Mesir ke dalam negeri saja, akan tetapi pemerintahan juga melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan Kuwait terkait pertukaran tenaga pengajar, waktu belajar, dan kurikulum. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Arab Saudi, Syaikh Hasan bin Abdullah dengan Menteri Pendidikan Kuwait, Syaikh Khalid Al- Mas'ud.³⁷

3.5. Raja Faisal dan Dukungan untuk Palestina

Raja Faisal seseorang yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai seorang yang taat pada agamanya dan berani dalam mengambil keputusan, sehingga tidak heran selama ia menjabat setiap peraturan atau kebijakan yang ia buat berlandaskan pada asas-asas Islam guna memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat Islam dan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Misi politik luar negeri Arab Saudi yaitu: *pertama*, memberikan kontribusi besar terhadap penjagaan perdamaian dan memperkuat hubungan antar negara di dunia internasional, termasuk memperkuat hubungan antara dunia Arab dan Islam. *Kedua*, tugas yang berkaitan dengan penjagaan perdamaian bagi seluruh masyarakat internasional³⁸. Dalam kebijakan politik luar negeri ini Arab Saudi pro terhadap negara-negara Islam, salah satunya Palestina yang menjadi fokus Arab Saudi dalam politik luar negerinya. Hal ini telah dirumuskan dalam pertemuan yang dilakukan oleh Raja Ibnu Saud dengan para ulama dan anggota keluarga kerajaan pada tahun 1943 yang membahas munculnya isu Zionisme.³⁹ Berdirinya Israel dalam wilayah Palestina didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Dari banyaknya kebijakan yang Raja Faisal cetuskan, yang paling mendapat sorotan dunia internasional yaitu keberaniannya atas membela Palestina. Hal ini terlihat dalam setiap pidato-pidatonya yang selalu menyerukan dukungannya atas

³⁵ Kutty, "Saudi Arabia Under King Faisal", 99.

³⁶ Machmudi, Hidayat, dan Agustina, "Sejarah Timur Tengah Kontemporer: Kepemimpinan Di Arab Saudi Dan Libya."

³⁷ Said, King Faisal: Raja Saudi Pelayan Umat, Penentang Imperialisme.

³⁸ Machmudi, Y., R. Hidayat, and E. Agustina. "Sejarah Timur Tengah Kontemporer: Kepemimpinan di Arab Saudi dan Libya." (2016).

³⁹ Lukman Hakim Siregar, Politik Luar Negeri Arab Saudi terhadap Amerika Serikat: Studi Kasus Peran Arab Saudi dalam Penyelesaian Masalah Palestina, Jakarta 1999. Tesis.

kebebasan Palestina dari Israel. Bahkan Raja Faisal tidak segan-segan akan memberikan ancaman atau perlawanan bagi negara-negara yang mencoba untuk ikut campur dalam membantu atau mendukung Israel. Hal tersebut merupakan bentuk perjuangan Arab Saudi (Raja Faisal) dalam membantu Palestina dari penjajahan Israel. Dalam salah satu pidatonya yang sangat terkenal yaitu pidatonya di pertemuan PBB tahun 1947 di New York, Pangeran Faisal mengatakan, *"Jika kalian ingin menjadi orang baik, maka berbuat baiklah dengan kekuasaan kalian"*. Pertemuan itu diadakan khusus membahas masalah Palestina dan membahas proyek pembagian kawasan itu.⁴⁰ Dalam kalimat pidatonya ini bermakna mengajak seluruh pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuasaan agar menggunakan kekuasaannya dengan baik diantaranya membantu yang tertindas yaitu palestina dan secara tidak langsung memberikan kritik keras kepada negara-negara Barat yang terus mendesak pembagian wilayah di Palestina.

Diselenggarakan muktamar-muktamar Islam merupakan kebijakan Raja Faisal yang bertujuan salah satunya mencari jalan keluar atas permasalahan Palestina. Di dalam muktamar tersebut, dibahas mengenai permasalahan dunia Islam termasuk Palestina. Muktamar ini diikuti oleh para tokoh, ulama, cendekiawan dan lain sebagainya. Berlangsungnya muktamar, diatur oleh pemimpin dari Liga Dunia Islam dengan di bawah pengarahannya langsung oleh Raja Faisal. Keputusan-keputusan muktamar di antaranya yang berkaitan pembelaan Palestina dan perlawanan Islam terhadap Israel adalah dengan membentuk gerakan perlawanan di Benua Afrika terhadap ajakan-ajakan Zionisme Yahudi, kemudian menyerukan persatuan dalam membantu Palestina melawan Israel, muktamar memutuskan bahwasannya Israel merupakan musuh bagi Islam. Muktamar mengajak kepada seluruh negara Islam untuk tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Israel. Diselenggarakannya muktamar ini guna menguatkan kedudukan dan mempersatukan umat Muslim di dunia serta mencari solusi-solusi bagi permasalahan yang ada yang mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh umat Muslim. Salah satunya dengan terselenggarakan Muktamar Islam ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Palestina.

Kunjungan Raja Faisal ke Mesir tepatnya di Kairo dalam rangka menghadiri KTT negara-negara Arab tingkat dua pada tahun 1964. Raja Faisal menyatakan bahwasanya Arab Saudi siap membela dan bertanggung jawab sepenuhnya atas masalah Palestina. Pemerintahan Arab Saudi telah membantu Palestina dengan memfasilitasi tentara, dan organisasi pembebasan Palestina. Konferensi yang berlangsung pada tahun 1965 di Jeddah, Raja Faisal memberikan pernyataan mengenai perpolitikan dengan Israel

"Sikap Arab Saudi adalah, tidak adanya perdamaian dan perjanjian dengan Israel dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang dekat. Seandainya bangsa Arab semuanya

⁴⁰ Amin Said, "King Faisal Raja Saudi pelayan Umat penentang imperialism" (Jakarta : Puataka Al Kautsar, 2014)

berkumpul untuk melakukan perjanjian atau melakukan perdamaian dengan Israel, maka kami sungguh akan keluar dari perkumpulan ini dan tidak ikut serta di dalamnya.”⁴¹

Di tahun 1965 terkuak bahwasannya Jerman telah melakukan kesepakatan dengan Israel dengan membantunya dalam menyuplai persenjataan. Hal tersebut terjadi pada tahun 1960. Terkuaknya kesepakatan rahasia antara Israel dengan Jerman telah membuat negara-negara Arab geram atas tindakan Jerman tersebut. Kemudian para pemimpin atau perwakilan negara-negara Arab berkumpul dan melakukan diskusi. Dalam pertemuan ini negara-negara Arab menentang dengan keras apa yang telah dilakukan Jerman dengan dikeluarkannya putusan-putusan guna Jerman berhenti memberikan bantuan dan kerjasama bentuk apapun kepada Israel, seperti pemutusan hubungan diplomatik, hubungan kerjasama ekonomi, menarik para duta besar negara-negara Arab dan memberikan peringatan kepada siapa saja yang bersikeras membantu Israel. Walaupun telah keluar putusan dari kesepakatan negara-negara Arab ini nyatanya tidak berpengaruh bagi Jerman. Jerman terus memberikan bantuan dan menjalankan hubungan politik dengan Israel. Atas tindakan Jerman yang tetap bersikukuh ini kemudian Arab Saudi melakukan pemutusan hubungan politik dengan Jerman.

Adapun alasan Jerman bersikukuh untuk terus melanjutkan hubungan diplomatik dengan Israel dan terus memberikan bantuan yaitu, dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa besar yang terjadi terhadap kaum Yahudi di Jerman di tahun 1941-1945, di mana peristiwa ini merupakan peristiwa pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Dibantainya orang-orang Yahudi ini menurut Hitler (Partai Nazi) bahwasanya orang-orang Yahudi berkonspirasi untuk menguasai dunia dan merusak kebudayaan Jerman. Dan di akhir tahun 1940-an Eropa dibanjiri oleh para pengungsi akibat perang, dan para sekutu sepakat untuk membentuk wilayah baru bagi orang Yahudi yang selamat dari pembantaian yang dilakukan Partai Nazi, yang tak lain wilayah baru tersebut ialah Israel. Peristiwa ini dikenal dengan Holocaust, atas peristiwa tersebut memberikan dampak traumatis yang sangat mendalam bagi orang-orang Yahudi. Oleh karenanya bantuan yang dilakukan oleh Jerman terhadap Israel ialah yang tak lain merupakan bentuk rasa tanggung jawabnya atas peristiwa pembantaian orang-orang Yahudi di Jerman pada masa perang dunia II tersebut.

Selain Jerman, Amerika juga merupakan salah satu negara yang terus mendukung Israel dalam melakukan penyerangan terhadap Palestina, telah membuat geram negara-negara Arab. Negara-negara Arab tidak akan segan-segan mengancam Amerika untuk menghentikan bantuannya kepada Israel. Salah satunya seperti yang telah dilakukan oleh Raja Faisal. Raja Faisal telah mengutus seorang utusan kepada Amerika yang bernama Syaikh Zaki Yamani di bulan April 1973. Syaikh Yamani mendapatkan tugas dari kerajaan untuk pergi ke Washington DC guna memperingatkan Amerika bahwasannya embargo minyak akan menjadi senjata

⁴¹ Amin Said, "King Faisal Raja Saudi pelayan Umat penentang imperialism" (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2014)

perang melawan Israel dan sebagai mana yang dikatakan Sheik Zaki Yamanai *"It is politically impossible for Saudi to expand production at the desired rate, unless the US changes its policy towards Israel."*⁴² Kemudian di bulan Mei 1973, Arab Saudi membentuk Committee for Saudi Oil. Dibentuknya Committee for Saudi Oil guna menyelesaikan permasalahan Palestina. Committee for Saudi Oil diketuai oleh Pangeran Fahd. Committee for Saudi Oil bertugas meneliti hal-hal yang berkaitan dengan minyak dan merencanakan embargo minyak.

Setelah Arab mengetahui Amerika telah mengirim pasokan kebutuhan perang kepada Israel, Arab Saudi melawannya dengan strategi lain seperti yang telah diperingatkan di bulan April, yaitu melalui jalur ekonomi dengan segala pertimbangannya. Pada bulan Oktober 1973 Arab Saudi melakukan embargo kepada Amerika Serikat. Kebijakan yang dilakukan Raja Faisal ini merupakan kebijakan yang dianggap berani oleh dunia internasional. Walaupun sebelumnya Raja Faisal agak meragukan atas kebijakannya ini.

Sebab sebelumnya pada perang enam hari negara-negara Arab lain telah melakukannya. Namun menurutnya dengan jalur penghentian ekspor minyak ke Amerika merupakan cara ampuh untuk memutuskan dan melumpuhkan Amerika. Setelah Arab Saudi Negara-negara Arab lainnya mulai mengikuti langkah yang diambil oleh Raja Faisal tersebut. Seperti yang diketahui, Amerika sangat bergantung dengan ekspor minyak dari negara-negara Arab. Kebijakan embargo minyak yang dipelopori oleh Raja Faisal ini memberikan pengaruh besar dengan menyebabkan krisis minyak dunia. Dengan melihat apa yang dilakukan Raja Faisal tersebut Negara-negara Barat mulai kewalahan dan mulai meninggalkan Amerika yang terus mendukung Israel.

Kebijakan -kebijakan raja Faisal tak luput dari pro kontra. Pihak yang kontra ini biasanya adalah mereka yang akan mengalami kerugian tertentu sebagai dampak dari kebijakan Faisal. Pihak-pihak yang kontra dengan Faisal sejatinya sangat beragam, datang baik dari dalam dan luar negeri. Pihak-pihak yang kontra dengan kebijakan Faisal yaitu dari anggota kerajaan, ketika Faisal memberlakukan pembatasan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan pribadi keluarga kerajaan. Hal ini menyebabkan keluarga kerajaan yang sudah terbiasa hidup mewah dan boros pada masa kepemimpinan Raja Saud harus melepaskan kemewahan-kemewahan yang sudah biasa mereka nikmati sebelumnya. kemudian dari kalangan para ulama Wahabi, di mana kalangan mereka ini melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap protes modernisasi yang dilakukan oleh Faisal diantaranya mengenai penayangan penyiaran televisi di tahun 1965, Bahwasannya penyiaran penayangan televisi bagi kalangan ulama wahabi hukumnya haram. selain kaum ulama modernisasi juga di tentang oleh Pangeran Khalid bin Musa'id. Adapun pihak-pihak yang kontra yang berasal dari luar seperti Amerika yang tidak senang dengan kebijakan Faisal terkait pendanaan bantuan untuk rakyat Palestina. Puncak dari

⁴² Abdel Majid Farid, *Oil and Security in the Arabian Gulf* (London : Croom Helm 1981)

akibat kontra tersebut adalah pembunuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh keponakannya sendiri, Faisal bin Musaid. Terlepas dari berbagai spekulasi alasan pembunuhan ini terjadi yang jelas adalah kejadian ini menjadi bentuk pelampiasan rasa tidak setuju yang tidak patut dalam pandangan moralitas Islam.

4. Penutup

Masa kepemimpinan Faisal bin Abdul Aziz adalah awal dari kemajuan, reformasi, dan modernisasi di Arab Saudi. Hal ini dapat dibuktikan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan dalam masa kepemimpinannya. Ia telah membangun sistem media massa bagi masyarakat Arab Saudi. Ia optimis bahwa kemajuan media massa akan menjadi bagian dari kemajuan masyarakat Arab Saudi. Faisal kemudian juga menyusun sistem perundangan dan hukum di Arab Saudi.

Hal ini sangatlah penting mengingat kondisi masyarakat yang belum memiliki satu aturan hukum pasti pada awal didirikannya Kerajaan Arab Saudi. Faisal juga membawa perubahan di dunia pendidikan dengan melakukan modernisasi pendidikan Arab Saudi. Ia mendirikan berbagai universitas termasuk Universitas Islam Madinah yang hingga saat ini aktif menerima mahasiswa dari berbagai penjuru Dunia. Ia juga mendirikan sekolah untuk perempuan Arab Saudi. Selain memperhatikan keselamatan dan kemajuan rakyatnya, ia juga turut aktif dalam melakukan pembelaan terhadap Palestina.

Hal ini terlihat dari setiap kebijakan-kebijakan khususnya kebijakan luar negeri, yang fokus utamanya pada kebebasan rakyat Palestina. Faisal telah menyelamatkan Arab Saudi dalam masa kepemimpinannya. Meski demikian, ada beberapa kebijakannya yang mendapat penentangan dari berbagai pihak, terutama keluarga kerajaan dan ulama konservatif.

Daftar Pustaka

- Abedin, Hassan Sayyid. *Abdul Aziz Al-Saud nad the Great Game in Arabia, 1896 – 1946*. Tesis. King's College London, 2002.
- Ahmad, Fadlan. "Pemilihan Umum Dewan Kota Arab Saudi 2005." *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab* 15, no. 2 (2018): 10-19.
- Alamri, Majed. "Higher Education in Saudi Arabia." *Journal of Higher Education Theory and Practice* 11, no. 4 (2011): 88-91.
- Al-Kahtani, Muhammad Zaid. *The Foreign Policy of King Abdul Aziz (1927 – 1953)*. University of Leeds, 2004.
- Beling, Willard A. *King Faisal and The Modernisation of Saudi Arabia*. Croom Helm, 1980.
- Bligh, Alexander. "The Saudi Religious Elite (Ulama) as Participant in the Political System of the Kingdom." *International Journal Middle East Study* 17 (1985): 37-50.
- Chai, Winberg, ed. *Saudi Arabia: A Modern Reader*. Indianapolis: University of Indianapolis Press.
- Daud, Safari. "Antara Biografi dan Historiografi (Studi 36 Buku Biografi di Indonesia)." *Analisis* 13, no 1 (2013).
- Farid, Abdel Majid. *Oil and Security in the Arabian Gulf*. London: Croom Helm, 1981.
- Gaury, Gerald de. *Faisal: King of Saudi Arabia*. Fons Vitae, 2008.

- Haif, Abu. "Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern)." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 3, no. 1 (2015): 12-24.
- Hamdan, Amani. "Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements." *International Education Journal* 6, no. 1 (2005): 42-64.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Kechichian, Joseph A. *Succession in Saudi Arabia*. Palgrave Macmillan, 2001.
- Kutty, Bilal Ahmad. *Saudi Arabia Under King Faisal*. Tesis. Aligarh Muslim University, 1997.
- Lacey, Robert. *The Kingdom*. Harcourt Brace Jovanovich, 1982.
- Mahmudi, Y., R. Hidayat, E. Agustina. "Sejarah Timur Tengah Kontemporer: Kepemimpinan Di Arab Saudi Dan Libya." (2016).
- McLoughlin, Leslie. *Ibn Saud: Founder of a Kingdom*. New York: St Martin's Press, 1993.
- Mujahid, Ghazy. "Education for Girls in Saudi Arabia." *Muslim Education Quarterly* 4, no. 3 (1987): 59-60.
- Octofrezi, Permana. "Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I)." *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2020): 13-38.
- Said, Amin. *King Faisal: Raja Saudi Pelayan Umat, Penentang Imperialisme Pertama*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Salsabila, Zakiyah. *Hukum Keluarga di Arab Saudi*.
- Siregar, Lukman Hakim. *Politik Luar Negeri Arab Saudi terhadap Amerika Serikat: Studi Kasus Peran Arab Saudi dalam Penyelesaian Masalah Palestina*. Tesis. Jakarta, 1999.
- Sirojudin, Didin dan Waslah. "Signifikansi Pengembangan Mutu Pendidikan Arab Saudi." *Dinamika* 5 (2020).
- Vassiliev, Alexei. *The History of Saudi Arabia*. Saqi Books, 2000.
- Wafi, Mahmud Hibatul. "Diskursus Reformasi Arab Saudi: Kontestasi Kerajaan Arab Saudi dan Wahabi." *Journal of Islamic World and Politics* 2, no. 1 (2018): 228-239.
- Yunal, Muhammad Hendra. "Pendidikan Arab Saudi: Tantangan dan Reformasi." *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 18, no. 1 (2022): 37-44.
- "King Saud bin Abdul Aziz." <https://houseofsaud.com/profiles/king-saud-bin-abdulaziz-al-saud/>, diakses pada 5 Desember 2022